

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta.
- Azwar, Saifuddin, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Budiarjo, Miriam, 1984, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Eddyono, Sri Wiyanti, 2007, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, Elsam, Jakarta.
- Fajar Nur Dewata, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gosita, Arif, 2014, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Hamzah, Andi dan Sumangelipu, 1984, *Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1996, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Indah S, Maya, 2014, *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Irianto, Sulistiyowati dan Sidharta, 2009, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Kelompok Kerja Convention Watch, 2004, *Hak Azazi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dan MaPPI FH UI, 2018, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2017, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Komnas Perempuan, Jakarta
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2018, *Membangun Akses ke Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2018, *Membangun Akses Ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Komnas Perempuan*, Jakarta

- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2019, "*Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*" dalam *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Komnas Perempuan, 2017, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Kusairi, Akhmad dan Ingrid Namira, *Kiprah 9 Tahun Menjaga Kehormatan Profesionalisme*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- M. Friedman, Lawrence, 1975, "The Legal System: A Social Science Perspective", Russel Sage Foundation, New York.
- M. Friedman, Lawrence, 1975, "*The Legal System: A Social Science Perspective*", Russel Sage Foundation, New York.
- Malinda, Anggun, 2016, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tersangka, Terdakwa, Terpidana*, Garudhawaca, Yogyakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, UNS Press, Surakarta.
- Muhadar, 2006, *Viktimitisasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang Press, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- O.S Hiariej, Eddy, 2016, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Pokja Laporan Tahunan MARI, 2017, *Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Pokja Laporan Tahunan MARI, 2018, *Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Ratna Batara Munti, et all, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Risda Ramadhan, Choky, et all, 2016, *Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

- Rishan, Idul, 2012, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Genta Press Yogyakarta.
- Sahetapy, J.E, 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung.
- Setiono, 2014, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, UNS Press, Surakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Suhadi, Amran, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, TB Rahma, Solo.
- Sujamto, 1996, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Paragonatama Jaya*, Jakarta.
- Tim Pokja Laporan Tahunan MARI, 2018, *Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention Center for International Crime Prevention, 1999, *Handbook on Justice for Victims*, United States Department of Justice Press, New York.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penilaian Hukum dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widiartana, G., 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam penanggulangan kejahatan*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta.
- Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 3277;

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 1. 047/KMA/SK/IV/2009, 2. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 129/KMA/SKB/IX/2009 – 04/SKB/P.KY/IX/2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Yudisial Republik Indonesia Nomor: 1. 02/PB/MA/IX/2012, 2. 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 096/KMA/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan.

PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat.

### C. Artikel Jurnal dan Internet

Ali, Mahrus, "Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Hukum*, Volume. 14 No. 2, 2007.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012, Tugas dan Fungsi Badan Pengawas, <https://bawas.mahkamahagung.go.id/profil/tugas-a-fungsi.html>.

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2013, *General Recommendation on women's access to justice*, [https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1\\_Global/CEDAW\\_C\\_GC\\_33\\_7767\\_E.pdf](https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_33_7767_E.pdf)

Detik News, 2018, *Hakim Diminta Hindari Diskriminasi Gender Saat Tangani Kasus Asusila*, <https://news.detik.com/berita/d-3824233/hakim-diminta-hindari-diskriminasi-gender-saat-tangani-kasus-asusila>.

Dewi Rismawati, Shinta, "Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif di Era Komodifikasi Hukum", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 13, Nomor 1, 2015.

Fadlil Sumadi, Ahmad, "Pengawasan Dan Pembinaan Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan di Bawahnya", *Jurnal Media Hukum*, Volume 19, Nomor 1, 2012.

Harnoko, R. Budi, "Di Balik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan", *Jurnal Muzawah*, Volume 2, Nomer 1, 2010

Hendrawati, Heni dan Agna Susila, "Kajian Yuridis PP No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Varia Justicia*, Volume. 13 No.2, 2017.

Hukum Online, 2018, *Perma Mengadili Perkara Perempuan Perlu Didukung Aturan Lain*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5aa173d89acbd/perma-mengadili-perkara-perempuan-perlu-didukung-aturan-lain/>,

ICJR, 2017, “*ICJR Mengapresiasi Terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*”, <https://icjr.or.id/icjr-mengapresiasi-terbentuknya-peraturan-mahkamah-agung-tentang-pedoman-mengadili-perkara-perempuan-berhadapan-dengan-hukum/>

Jihan Andari, Annisa “Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Tiga Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak Perempuan”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 7 Nomor III, 2011.

Jurnal Perempuan, 2016, “*Amrina Habibi: Absennya Perspektif Adil Gender Sebabkan Kasus Kekerasan Seksual Tidak Pernah Tuntas.*”, <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/amrina-habibi-absenya-perspektif-adil-gender-sebabkan-kasus-kekerasan-seksual-tidak-pernah-tuntas>.

Juwana, Hikmahanto, “Human Rights in Indonesia”, *Jurnal Hukum Internasional Indonesia Journal of International Law (IJIL)*, Volume 4, Nomor 1, 2006.

Kania, Dede, “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, 2015.

Komnas Perempuan, 2017, *15 Bentuk Kekerasan Seksual*, [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20EKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20EKSUAL.pdf)

Kompas.com, 2012, *Kasus Foto Novi, Polisi yang Diperiksa Jadi 13 Orang*, <https://travel.kompas.com/read/2012/10/19/18320985/kasus.foto.novi.polisi.yang.diperiksa.jadi.13.orang>.

MaPPI FH UI, 2018, *Cerita Perubahan “Perma No. 3 Tahun 2017 : Terobosan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana.”*, <http://mappifhui.org/2018/07/24/cerita-perubahan-perma-no-3-tahun-2017-terobosan-hukum-bagi-perempuan-dalam-sistem-peradilan/>.

Obsession News, 2016, *Ruang Lingkup Korban dan Ragam Viktimisasi*, <https://www.obsessionnews.com/ruang-lingkup-korban-dan-ragam-viktimisasi/>,

Putu Rai Yuliantini, Ni, “Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2015.

Rahmi, Atikah, Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, Volume 4 Nomor 2, 2019.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>

Tempo, 2018, “*LBH APIK Kritik Polisi soal Penanganan Kasus Kekerasan Seksual*”, <https://nasional.tempo.co/read/1149525/lbh-apik-kritik-polisi-soal-penanganan-kasus-kekerasan-seksual>

UN General Assembly, 1993, *Declaration on the Elimination of Violence against Women*, A/RES/48/104, <https://www.refworld.org/docid/3b00f25d2c>

United Nations Human Rights, 1993, Vienna Declaration and Programme of Action, <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx>, Part 1 paragraph 18.

#### D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1390/Pid.B/2012/PN.LP.

Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.Marisa

Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 28/Pid.Sus/2003/PN.PWR

Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 562/Pid.B/2014/PN.SIM

#### E. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Fauziyah, Aryanti Nur, 2019, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Lestari Hasibuan, Fuji, 2018, “Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan dan Anak Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Prabowo, Imam, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Pemenuhan Hak Restitusi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.